

PENGELOLAAN INFORMASI DALAM FRAMEWORK E-PARTICIPATION DI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA KEBASEN, BANYUMAS

Adi Winarno¹⁾, Lukito Edi Nugroho²⁾, Widyawan³⁾

^{1), 2), 3)} Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, UGM Yogyakarta
Jl. Grafika No. 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Email : adi.cio.8a@mail.ugm.ac.id¹⁾, lukito@ugm.ac.id²⁾, widyawan@ugm.ac.id³⁾

Abstrak

Makalah melaporkan hasil penelitian yang dilaksanakan di KIM Desa Kebasen terkait pengelolaan informasi sesuai framework e-Participation. Dihasilkan spesifikasi menurut model Kalampokis et.al. dari sisi stakeholder, proses partisipasi, dan media TIK yang digunakan. Di lapangan, media non-TIK (konvensional) ternyata masih bisa dan kerap dipakai dalam melakukan komunikasi dengan warga desa. Pengelolaan media TIK dan non-TIK ini secara simultan bisa menjangkau beragam lapisan masyarakat desa. Kerjasama antar stakeholder makin meningkatkan efektifitas kinerja KIM ini dan perangkat kerja yang digunakannya.

Kata kunci: KIM, informasi, e-Participation, stakeholder, proses partisipasi, komunikasi, media TIK, media non-TIK.

1. Pendahuluan

Demokrasi merumuskan adanya upaya-upaya untuk melibatkan masyarakat dalam partisipasi publik dimana fokus perhatian, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat tak bisa dipisahkan dari proses tata kelola pemerintahan yang baik [1]. Dampak partisipasi publik adalah terbangunnya pengetahuan mengenai isu-isu lokal, teridentifikasinya nilai-nilai yang dianggap penting dalam komunitas, memberdayakan sumberdaya lokal, secara umum meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, menciptakan rasa turut memiliki dan mendukung atas rencana pembangunan dan peraturan yang dibuat pemerintah, memenuhi asas legalitas, dan mengurangi dampak biaya akibat tidak dilibatkannya masyarakat [2]. Menurut Sherry Arnstein dalam Sumarto, ada delapan tangga partisipasi: *Manipulation, Therapy, Placation, Informing, Consultation, Partnership, Delegated power* [3], dan untuk meningkatkan kualitas partisipasi diupayakan agar terus melangkah ke setiap anak tangga partisipasi yang lebih tinggi dengan beragam metode dan teknik.

Namun masalah komunikasi dan partisipasi masyarakat ini tidak mudah. Di berbagai negara, misalnya di Eropa Tengah dan Timur [4] seringkali warganya tidak memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak bisa mengkomunikasikan pendapat dan keinginannya kepada

pemerintah masing-masing. Menurut Kalampokis, E., Tambouris, E., dan Tarabanis, K. [5], di Eropa terjadi apatisisme publik yang terlihat dari menurunnya tingkat partisipasi dalam pemungutan suara. Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga publik masih ada yang menggunakan komunikasi satu arah dengan publiknya [6]. Isu di berbagai negara tersebut coba diatasi dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, [7], [8], [9], [10], [11].

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan berbagai perkembangannya semakin memungkinkan keterlibatan masyarakat di dalam partisipasi publik dan ini memunculkan konsep e-Participation. Dari berbagai definisi, e-Participation ini secara umum dapat dirangkum sebagai segala upaya untuk memperluas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, dengan menggunakan berbagai bentuk ragam teknologi informasi dan komunikasi untuk mewedahi beragamnya kemampuan komunikasi dan teknis masyarakat, dimana informasi yang relevan disajikan dalam format yang dapat diakses dan dipahami sehingga meningkatkan pemahaman dan kontribusi masyarakat sehingga mengubah proses dan meningkatkan kualitas komunikasi dan kontribusi masyarakat terhadap sesama masyarakat dan pemerintah [7], [12], [13].

Di Indonesia, isu komunikasi dalam partisipasi publik menggunakan media TIK atau e-Participation ini ditanggapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kemkominfo dalam dokumen Rencana Strategis Kemkominfo 2010-2014 [14] yang mendasari perlunya peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi – salah satunya dalam bentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) [15]. KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan fasilitasi pembentukan KIM dan fasilitasi penggunaan TIK serta kerja sama lainnya berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 489/199/2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Banyumas [16]. Salah satu parameter

penting disebutkan bahwa fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel [14].

Pemerintah sudah menyediakan regulasi dan dukungan teknis, namun tetap ada keterbatasan partisipasi masyarakat [17] untuk terlibat dalam mengembangkan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan e-Participation ini, walaupun KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif.

Dalam rangka peningkatan partisipasi KIM maka akan diteliti profil sosial KIM yang menjadi obyek penelitian yaitu KIM Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Dari profil ini akan diusulkan sebuah metode pengelolaan informasi berdasarkan model e-Participation dari Kalampokis, et.al [5] yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan mempertimbangkan para pemangku kepentingan lain, misalnya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten serta masyarakat yang tidak menjadi anggota KIM. Metode adaptasi ini diharapkan dapat membantu komunitas lokal seperti KIM untuk tumbuh dan berkembang dalam dinamika partisipasi publik melalui media TIK atau e-Participation.

2. Pembahasan

Sebagai obyek penelitian adalah KIM Desa Kebasen yang sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu (2007). Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian yang dilaksanakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi [18].

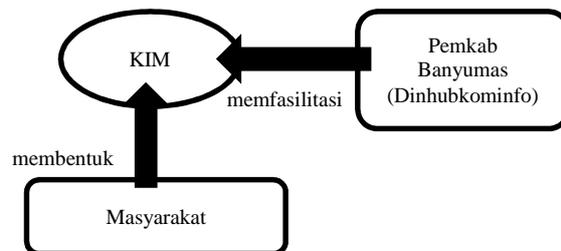
Observasi yang dilakukan bersifat terbuka dengan mengamati situasi dan interaksi dalam internal dan eksternal KIM, situs blog KIM (www.kimdesakebasen.blogspot.com), dan *fanpage* Facebook KIM Desa Kebasen.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur terhadap pengurus KIM yaitu ketua kepengurusan KIM periode baru (2013-2019), sekretaris beserta dua anggota KIM dari kepengurusan sebelumnya (2007-2013), Kepala Desa Kebasen, dan Kepala Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pemerintah Kabupaten Banyumas. Wawancara ini termasuk kategori *in-depth interview* yang bertujuan untuk menemukan data dan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Lokasi wawancara meliputi Kantor Pemerintah Desa Kebasen dan Kantor Bidang Kominfo di Purwokerto.

Dokumentasi yang diteliti meliputi berbagai data tentang profil Desa Kebasen dan KIM Desa Kebasen yang berbentuk peraturan dan buku. Misalnya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010

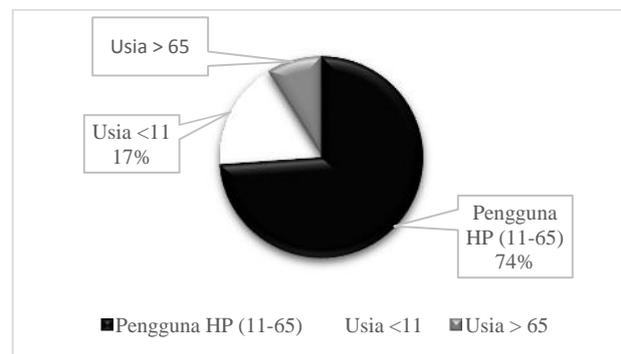
tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 489/199/2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Banyumas, Buku Kabupaten Banyumas dalam Angka 2012, Buku Kecamatan Kebasen dalam Angka 2012, dan Buku Data Sarana Komunikasi, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Banyumas Tahun 2012.

Diagram yang menjelaskan relasi KIM dengan entitas lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram relasi KIM, Pemerintah, dan Masyarakat

Desa Kebasen (terdiri dari 4 dusun, 4 RW, dan 36 RT) merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Kebasen, dan salah satu desa dari 331 desa di Kabupaten Banyumas. Desa seluas 4 km² yang berjarak sekitar 17,3 km dari pusat kota, Purwokerto, ini berpenduduk 1.588 KK dengan 5.833 jiwa dan mempunyai kepadatan penduduk 1.462 jiwa per km². Jumlah penduduk laki-laki sejumlah 2.908 jiwa dan perempuan 2.925, yang kebanyakan bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, petani, pegawai, peternak, dan ibu rumah tangga. Jumlah pemuda usia 16-30 tahun adalah 1.180 jiwa dan merupakan 20% dari jumlah penduduk keseluruhan [19] [20]. Perkiraan jumlah pengguna perangkat komunikasi genggam (*handphone/HP*) dari usia 11-65 tahun sekitar 4310 atau 74% dari keseluruhan penduduk, sedangkan perkiraan jumlah penduduk yang bisa menggunakan media Internet sekitar 30% dari jumlah penduduk dan umumnya dari kalangan muda.



Gambar 2. Komposisi Pengguna HP dan Non Pengguna HP

Data infrastruktur pendukung TIK di wilayah Kecamatan Kebasen meliputi 4 Warung Internet (Warnet), 1 Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), dan Mobile-PLIK. Operator telekomunikasi yang mendirikan menara di

wilayah Kecamatan Kebasen antara lain Axis, Indosat, Telkomsel, dan XL [21].

Kepengurusan KIM periode baru (2013-2019) sebagian besar terdiri dari pemuda. Para pemuda ini menurut Tapscot dalam Indrajit adalah generasi baru yang lebih paham komputer dan teknologi digital dan siap untuk menggunakannya (*e-literacy*) [22] [23]. Hal ini merupakan salah satu dasar penting bagi persiapan penerapan skema pengelolaan informasi berbasis e-Participation. Ditambah lagi cukup besarnya penetrasi perangkat TIK dan pendukungnya seperti disampaikan sebelumnya.

Beberapa program kerja KIM periode 2013-2019 antara lain:

- a. Penguatan lembaga: dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan internal mengenai KIM dan fungsi-fungsinya di masyarakat. Termasuk kemampuan mengkomunikasikan informasi, dan mengolah informasi tersebut agar berguna bagi atau diperlukan oleh warga desa. KIM sebagai mitra Pemerintah Desa juga menjadi sarana penyebarluasan informasi seputar program dan kebijakan desa setempat.
- b. Pemberdayaan berbagai media: dengan mensinergiskan media konvensional dan modern karena melihat beragamnya kemampuan masyarakat dalam mengakses media komunikasi. Misalnya menggunakan media baru seperti grup dan *fanpage* Facebook, pembuatan situs blog KIM dengan sasaran untuk segmen warga yang memahami TIK. Selanjutnya media konvensional berupa majalah dinding dan buletin. Majalah dinding direncanakan minimal 1 di Balai Desa, bahkan jika memungkinkan 1 tiap RT (Rukun Tetangga) yang ditempel di Pos Keamanan Lingkungan. Dan diberdayakannya tindakan komunikasi secara langsung dengan penyebaran (*gethok tular*) informasi seputar KIM minimal kepada pengurus RT dalam forum Pertemuan tingkat RW (Rukun Warga).
- c. Berjejaring dengan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) setempat dan membantu promosi UKM. Selain itu KIM juga berjejaring dengan kalangan perempuan yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga dalam Kelompok Usaha Mandiri (KUM), kegiatan ekonomi yang bertujuan menambah pendapatan dan meningkatkan taraf hidup.
- d. Pelatihan pihak eksternal KIM (yaitu warga lainnya) misalnya dalam menggunakan media komunikasi baru dan bagaimana memperoleh serta mengelola informasi.
- e. Penguatan kualitas informasi dengan tujuan mendidik dan memotivasi masyarakat agar warga mempunyai pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat dalam proses berbagi informasi, pengetahuan, atau keterampilan [24].

Dukungan dari pemerintah desa setempat berupa anggaran tahunan yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang disetujui Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara politis dan penempatan 2 perangkat desa sebagai pengurus KIM untuk mendukung kinerja KIM. Hal ini menunjukkan dukungan dari pemerintahan setempat baik dalam bidang politis, anggaran, maupun kapasitas lembaga karena dengan kerjasama yang saling percaya seperti ini akan membuat KIM bisa diterima di lembaga pemerintahan desa dan di antara warga masyarakat, walaupun KIM tetap diposisikan untuk independen dan mandiri sebagai mitra pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat. Kekuatan lembaga swadaya masyarakat sebagai *civil society* dan adanya ruang partisipasi dalam pemerintahan desa merupakan beberapa prasyarat *good governance* [3].

Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa pengelolaan KIM yang sudah bertahun-tahun ini masih perlu ditingkatkan optimalisasinya. Dari sisi pemerintah daerah hal ini disebabkan salah satunya fungsi pengelolaan informasi yang belum fokus akibat adanya dinamika perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penempatan personil yang belum tepat dan jumlahnya kurang memadai walaupun sudah mulai berkembang belakangan ini. Perkembangan positif lain yang perlu dicatat adalah sudah ada regulasi yang mendukung misalnya Perda SOTK dan rencana pengesahan Perbup Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Informasi yang salah satu poinnya adalah tentang pengelolaan KIM, hal ini sesuai dengan aturan yang lebih tinggi di tingkat Kementerian Kominfo [25]. Hal ini memungkinkan KIM menjadi lembaga yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga diharapkan akan meningkatkan daya tawar KIM. Selain regulasi, ada dukungan anggaran di tiap tahun anggaran yang digunakan untuk penguatan kelembagaan dan fasilitasi kegiatan KIM.

Di tengah globalisasi, perkembangan TIK disikapi dengan cermat dan agar sinergis khususnya dalam pengelolaan KIM. Dukungan teknis dari Bidang Kominfo misalnya menyediakan media subdomain desa agar KIM bisa mengelolanya. Direncanakan tahun 2013/2014 untuk membuat KIM Desa Kebasen menjadi KIM percontohan dengan membantu infrastruktur TIK, misalnya subdomain tersebut.

Pemerintah daerah juga berusaha menawarkan dan mendorong operator telekomunikasi untuk masuk ke lokasi KIM Desa Kebasen atau lokasi lain yang sesuai dengan kebijakan zonasi menara telekomunikasi. Penawaran dimudahkan dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Zonasi Menara Telekomunikasi yang terintegrasi dengan www.banyumaskab.go.id yang ditargetkan dapat diakses mulai Desember 2013.

Fasilitasi ini dilaksanakan bertahap dan berproses khususnya untuk peningkatan kapasitas SDM KIM agar

mampu memahami, mengelola, dan menggunakan TIK untuk misalnya mempromosikan potensi lokal. Juga sadar fungsi KIM akan pengelolaan informasi, dan harus lebih kreatif dalam mengelola informasi. Bidang Kominfo juga menyadari keterbatasan SDM yang mau terlibat, hal regenerasi dan pemberdayaan potensi warga agar bisa didukung oleh pemerintah desa yang lebih mengenal potensi SDM lokal.

Dari observasi di lapangan ternyata KIM Desa Kebasen sudah memiliki visi misi dan rencana strategis. Hal ini menjadi nilai yang penting agar KIM tahu tujuan, arahnya, siapa yang menjadi target, apa yang menjadi target, dan bagaimana mengatasi permasalahan pengembangan KIM. Masalah ini termasuk kendala dukungan dari pihak luar, baik pemerintah maupun warga, karena KIM seharusnya adalah lembaga swadaya yang mampu tumbuh secara mandiri dalam pengelolaan informasi.

Mengenai pilihan media TIK yang sesuai kebutuhan setempat, dari hasil wawancara lebih condong ke penggunaan SMS dan internet. Keselarasan kebutuhan dan penggunaan TIK yang dapat terjangkau (*feasible*) berdasarkan data sebelumnya menghasilkan dua media ini yang tidak hanya dianggap tepat pada saat ini namun berpotensi besar di masa yang akan datang (melakukan edukasi TIK terhadap warga). Sehingga dengan kombinasi media SMS yang sudah masif, warga diberikan pilihan media internet yang bisa menyajikan informasi secara lebih lengkap dan luas. Penggunaan kedua media TIK ini juga dalam upaya untuk tidak memaksakan TIK yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya, dan potensi lokal yang ada. Mulai dari kebutuhan inti, dasar, yang diharapkan, tambahan, dan potensial akan informasi. Dari hasil wawancara, maka untuk media SMS saat ini difokuskan kepada para Ketua RT yang memiliki HP untuk penyampaian informasi dan diproyeksikan ke depan bertahap untuk tokoh masyarakat dan pemuda serta akhirnya bisa menjangkau seluruh warga, terutama untuk informasi yang mendesak dan penting.

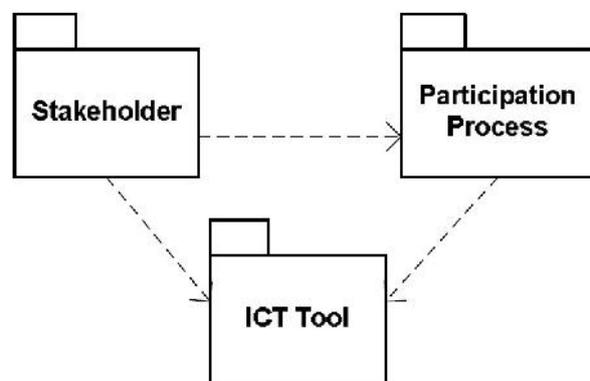
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi KIM: konsistensi pelaksanaan visi misi dan rencana strategis, pemberdayaan media TIK – baik SMS ataupun internet masih harus mempertimbangkan beberapa faktor (misalnya untuk penggunaan SMS: dana, privasi/keleluasaan pribadi, dan pemilik nomor telepon genggam mudah berganti-ganti nomor - khususnya pemuda; sedangkan untuk internet: aksesibilitas dan dana).

Dari sisi pemerintah desa: perlunya penguatan dukungan politis dan anggaran serta kemauan memposisikan KIM sebagai mitra dalam pengelolaan informasi di desa, selain itu juga perlunya dukungan keterwakilan perangkat pemerintahan desa di dalam struktur KIM karena masih adanya kepercayaan dan ketergantungan kepada perangkat pemerintahan desa.

Sedangkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi pemerintah daerah adalah: dukungan anggaran dan penguatan kelembagaan KIM, termasuk peningkatan kualitas SDM pengelola KIM baik teknis pengelolaan informasi maupun media penyebarannya, khususnya TIK.

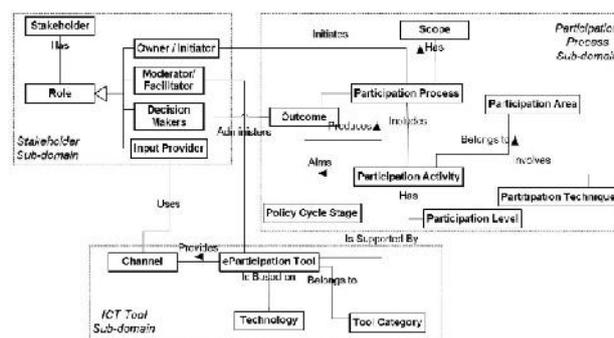
Maka disajikan penerapan sebuah metode e-Participation berdasarkan budaya setempat yang sangat menginginkan adanya partisipasi tokoh masyarakat, perancangan rencana strategis, dan penggunaan media HP di tingkat Ketua RT untuk penyampaian informasi, serta pengelolaan informasi melalui media Internet.

Adapun metode e-Participation menurut Kalampokis, et.al. [5] yang menjadi model acuan dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:



Gambar 3. Model E-Participation Menurut Kalampokis, et.al [5]

Dalam gambar 4 disajikan penjelasan bagaimana antar entitas mempunyai relasi dengan entitas lain dalam bentuk proses-proses atau fakta kepemilikan/identitas:



Gambar 4. Rincian Model E-Participation menurut Kalampokis et.al [5]

Sedangkan dari hasil penelitian, didapatkan beberapa hal terkait model acuan tersebut:

- a. *Stakeholder* (parapihak: yaitu individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi secara positif atau negatif oleh suatu kegiatan [3]): yaitu KIM Desa Kebasen, warga Desa Kebasen,

Pemerintah Desa Kebasen, Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sesuai model di atas, parapihak ini mempunyai peran yang bisa berbeda, sebagai inisiator/yang mengawali, fasilitator, pengambil keputusan, dan penyedia masukan. Peran pemerintah, baik desa maupun kabupaten hanya sebagai fasilitator dan pemberi masukan. Fungsi pemberi masukan juga dilakukan oleh warga desa. Sedangkan KIM-lah yang menjadi inisiator dan pengambil keputusan dalam kegiatan-kegiatannya.

- b. Proses partisipasi: dalam model ini, KIM mempunyai cakupan (*scope*) daerah yaitu di wilayah Desa Kebasen, mempunyai cakupan partisipasi yaitu pengelolaan informasi – termasuk penyebarluasannya, ada tingkatan partisipasinya yaitu di level *Informing*, dengan teknik tertentu – untuk saat ini masih kolaboratif antara konvensional (lisan dan media cetak) dan modern (TIK: SMS, situs blog, dan *fanpage*), ada hasilnya – salah satunya adalah mendorong pemerintah untuk memberi fasilitasi dan sekaligus menjadikan KIM sebagai mitra. Sesuai dengan delapan anak tangga partisipasi Arnstein, KIM berada di antara tahapan *Informing* dan *Partnership* dalam konteks kemitraan dengan pemerintah.
- c. Perangkat TIK yang digunakan: perangkat TIK yang digunakan lebih dari satu jenis meliputi SMS, situs blog, dan *fanpage*. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi setempat dan kondisi KIM itu sendiri.

Beberapa ciri kekhasan lokal yang bisa menambah kekayaan model di atas salah satunya adalah masih tingginya kepercayaan dan kebutuhan warga desa terhadap perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sehingga ini sekaligus menjadi modal sosial (*social capital*) dan potensi kelemahan karena adanya ketergantungan terhadap beberapa figur dan terpecahnya konsentrasi karena figur-figur ini bisa aktif terlibat tidak hanya di KIM, namun misalnya juga di Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) atau sebagai pengurus RT/RW/Dusun. Dari hasil penelitian, sudah dimulai upaya regenerasi yang melibatkan para pemuda (pria dan wanita) yang beberapa dari mereka belum pernah terlibat di kepengurusan lembaga pedesaan. Selain itu, para pemuda ini juga mempunyai kemampuan belajar dan adaptasi terhadap perubahan metode dan teknik partisipasi, termasuk penggunaan TIK.

Selain itu, dalam penelitian di lapangan, terlihat kemitraan yang dekat antara pemerintah desa, kabupaten, dan KIM, dan ini menjadi salah satu faktor potensial tetap hidupnya KIM di masa yang akan datang.

Untuk fokus kegiatan penyebarluasan informasi, KIM Desa Kebasen terlihat mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan warga desa, misalnya informasi dan pelaksanaan kegiatan pemberantasan hama tikus, promosi produk kegiatan ibu-ibu dalam kegiatan usaha

mandiri, dan sosialisasi pemilih pemula. Perihal kegiatan yang adaptif dan mau peduli terhadap kebutuhan warga adalah sangat penting diperhatikan oleh KIM karena akan makin meningkatkan kepedulian warga terhadap KIM dan program kerjanya, terlebih jika disampaikan dalam medium yang tepat dan terjangkau, baik konvensional ataupun modern.

3. Kesimpulan

Partisipasi publik yang dilakukan KIM Desa Kebasen telah menggunakan inovasi/terobosan dalam level desa yaitu dengan digunakannya media TIK untuk menyebarluaskan informasi sekaligus mengkolaborasikannya dengan media konvensional.

Tidak sebatas hanya terobosan, namun juga harus tepat sasaran. Misalnya rencana hanya akan mengirimkan SMS kepada para Ketua RT, hal ini dikarenakan faktor mudahnya warga berganti nomor HP, menjadikan program penyebarluasan informasi diharapkan tidak sia-sia.

Media massa disarankan untuk dilibatkan di masa yang akan datang karena sebagai media massa - sebagai *stakeholder* dalam kerangka partisipasi publik yang lebih luas, mempunyai jangkauan lebih sehingga kinerja KIM Desa Kebasen juga dipromosikan lebih luas dan bisa memberikan inspirasi bagi lembaga swadaya sejenis maupun lainnya di berbagai tempat.

KIM Desa Kebasen juga diharapkan mencoba bekerjasama dengan Fokohumas (Forum Komunikasi Kehumasan) yang memiliki jangkauan informasi lintas lembaga pemerintahan termasuk jika ada program-program yang bisa menjadi program bersama dengan KIM Desa Kebasen.

Penggunaan media TIK disarankan untuk lebih memberdayakan fasilitas yang sudah ada, misalnya menggunakan media MPLIK dari Kemkominfo dengan meminta jadwal kunjungan ke Balai Desa atau lokasi lain pada jam potensial ramai pengguna. Secara bertahap, perlu dipertimbangkan edukasi TIK dan berbagi pakai koneksi internet (*wireless*).

Daftar Pustaka

- [1] J. Creighton, *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*, San Fransisco: Jossey-Bass, 2005.
- [2] R. Burby, "Making plans that matter: citizen involvement and government action," *Journal of the American Planning Association*, vol. 69, no. 1, pp. 33-49, 2003.
- [3] H. S. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- [4] International Centre for Policy Studies, *Citizen Participation Handbook: People's Voice Project International Centre for Policy Studies*, G. Holdar, O. Zakharchenko dan A. Natkaniec, Penyunt., Kyiv: "iMedia" Ltd., 2002.
- [5] E. Kalampokis, E. Tambouris dan K. Tarabanis, "A Domain Model For eParticipation," dalam *The Third International Conference on Internet and Web Application and Services*, 2008.
- [6] K. Hanna, "The paradox of participation and the hidden role of

- information: a case study," *Journal of the American Planning Association*, vol. 66, no. 4, p. 398-410, 2000.
- [7] E. Tambouris, E. Kalampokis dan K. Tarabanis, "eParticipation Research Project in The European Union: A Survey," *Int. J. Electronic Business*, vol. 6, no. X, 2008.
- [8] T. Chrissafis dan M. Rohen, "European eParticipation Developments: From ad hoc Experiences towards Mass Engagement".
- [9] M. Milakovich, "The Internet and Increased Citizen Participation in Government," *JeDEM*, vol. 2, no. 1, pp. 1-9, 2010.
- [10] M. Aizi, Shahizan dan M. Syakiran, "Electronic Participation in Malaysia," *Journal of e-Government Studies and Best Practices*, 2011.
- [11] Department of Economic and Social Affairs Division of Sustainable Development United Nations, "Innovation for Sustainable Development," 2008.
- [12] A. Macintosh, "Characterizing E-Participation in Policy-Making," dalam *Proceedings of The 37th Hawaii International Conference on System Sciences - 2004 Track 5*, Hawaii, 2004.
- [13] V. Tundjungsari, J. Istiyanto, E. Winarko dan R. Wardoyo, "E-Participation Modelling and Developing with Trust for Decision Making Supplement Purpose," (*IJACSA International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 3, no. 5, pp. 55-62, 2011.
- [14] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tahun 2010-2014*, 2010.
- [15] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial*, 2010.
- [16] Pemerintah Kabupaten Banyumas, *Keputusan Bupati Banyumas Nomor 489/199/2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Banyumas*, 2011.
- [17] J. K. Kampen, "Good governance at the local level: toward a global village or a city republic?," *Economic and Environmental Studies*, vol. 9, no. 1, 2009.
- [18] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- [19] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Kebasen Dalam Angka 2012*, Purwokerto: BPS Kabupaten Banyumas, 2012.
- [20] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2012*, Purwokerto: BPS Kabupaten Banyumas, 2012.
- [21] Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Banyumas, *Data Sarana Komunikasi, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Banyumas Tahun 2012*, Purwokerto: Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2012.
- [22] D. Tapscott, *Growing Up Digital: The Rise of The Next Generation*, New York: Mc-Graw Hill, 2000.
- [23] R. E. Indrajit, "Strategi dan Kiat Meningkatkan E-Literacy Masyarakat Indonesia," dalam *Sistem Informasi: Berbagai Makalah tentang Sistem Informasi yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Sistem Informasi 2005 di ITB*, Bandung, Informatika, 2005, pp. 37-45.
- [24] R. Harun dan E. Ardianto, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- [25] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota*, 2010.

Biodata Penulis

Adi Winarno, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Program Studi Ilmu Komputer FMIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2002. Saat ini menjadi mahasiswa Prodi S2 Magister Teknologi Informasi - CIO di Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Lukito Edi Nugroho, memperoleh gelar Insinyur (Ir.), Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 1989. Memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) James Cook University, Australia, lulus tahun 1994. Memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) Monash University, Australia, lulus 2002. Saat ini menjadi Dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Widyawan, memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T), Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 1999. Memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) Erasmus University, Rotterdam, Belanda, lulus tahun 2003. Memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) Cork Institute of Technology, Irlandia, lulus tahun 2009. Saat ini menjadi Dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.